

Peran Sektor Swasta dalam Pemulihan Ekosistem Hutan melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem dan Permasalahannya (Studi Kasus PT Restorasi Ekosistem Indonesia) = the Role of Private Sector in Restoring Forest Ecosystem Through Ecosystem Restoration Policy and Its Issues (Case Study of PT Restorasi Ekosistem Indonesia)

Hening Sukma Daini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555644&lokasi=lokal>

Abstrak

Kebijakan Restorasi Ekosistem (RE) adalah wujud dari pelaksanaan konsep konsesi konservasi dalam sektor perhutanan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kawasan Hutan Produksi yang mengalami deforestasi masif. Pemberian izin RE dilakukan melalui permohonan, hingga saat ini seluruh pemegang izin berasal dari sektor swasta. Tulisan ini akan membahas dinamika permasalahan yang dihadapi pemegang izin diikuti dengan analisis hukum atas resolusi permasalahannya. Lebih lanjut penelitian akan didasarkan pada kasus yang terjadi di PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif didukung dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber. Adapun dinamika permasalahan yang diidentifikasi adalah konflik tenurial, konflik sosial, dan tingginya biaya pelaksanaan RE. Pemerintah perlu mendukung penuh pelaksanaan RE dengan ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik di dalam konsesi. Kemudian juga mengadakan suatu modifikasi pemberian insentif bagi pemegang izin agar RE dapat menjadi solusi pengusahaan hutan yang tepat kedepannya.

.....The Ecosystem Restoration Policy (RE) is an implementation of the conservation concessions' concept in Indonesia's forestry sector. This policy is held due to massive deforestation in the Production Forest. The granting of RE permit is done by proposal, until now all permit holders are from the private sector. This paper will discuss the problems faced by permit holders followed by a legal analysis of the resolution of the problems. Furthermore, the research will be based on cases that occurred at PT Restorasi Ekosistem Indonesia. The research method used is juridical-normative supported by interviews form several sources. The dynamics of the problems identified such as tenure conflicts, social conflicts, and the high costs of RE's operational. The government needs to support the implementation of RE by actively participating in resolving conflicts in the concessions. Then also held several incentives for permit holders so that RE could be the right solution for forest cultivation in the future.